

## *Media dan Pengawasan Demokrasi dalam Pilkada 2015*

**Ignatius Haryanto**

**ABSTRACT:** It is a matter of fact that today there is almost no independent journalism all over Indonesia. As a consequence journalists dependently rely on political conditions led by those who have economic sources to pay for news and advertisements. It is not wrong at all when the Press Publishers announced in their statement that only 30 % of press release remains independent from political power and money. This is the real condition challenging mass media to attain respect from the readers. The question is therefore who is responsible when news becomes a commodity of exchange? That is why the general election becomes a litmus test for independent news to exist.

**KEY WORD:** Independent journalism, political power, economic reason, and professionalism

**ABSTRAK:** Tidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesional dan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politik lokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapan selamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pula jika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehat hanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yang membuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh dari kebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapa kalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya ada antara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum.

**KATA KUNCI:** pers independen, kuasa politik, masalah ekonomi, dan profesionalisme

## 1. PENDAHULUAN

Lebih dari sepuluh tahun lalu, penulis telah menulis masalah ini dalam dua artikel di Harian Kompas, yang menyangkut masalah pers, pemilihan kepala daerah dan masalah demokratisasi.<sup>1</sup>

Ketika membaca masalah yang telah penulis ulas 10 tahun lalu itu, penulis tersadar bahwa tak banyak yang berubah dari konstalasi yang ada saat ini. Sejumlah point yang pernah penulis angkat sepuluh tahun yang lalu ketika Pilkada baru saja dimulai adalah:

1. Ada sejumlah pihak mendirikan media di berbagai wilayah Indonesia dengan aneka motif di belakangnya: memberikan pasokan informasi kepada warga masyarakat, menjadikan media sebagai institusi bisnis, atau menjadikan media sebagai alat politik guna kepentingan tertentu
2. Kita pun sempat melihat Indonesia sempat mengalami konflik sosial berkepanjangan di akhir masa kekuasaan Suharto hingga awal masa Reformasi (tahun 1997-2004) mulai di Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Aceh hingga Papua.
3. Dengan arah menuju transisi politik menuju negara yang demokratis, Jack Snyder, seorang guru besar ilmu politik dari Columbia University, dalam bukunya *From Voting to Violence* (Dari Pemilihan Umum ke Pertumpahan Darah, terj 2003) menunjukkan bahwa media massa memiliki peran yang besar dalam proses transisi politik dari zaman otoritarianisme menuju arah demokratisasi. Patut dicatat bahwa Snyder menunjukkan proses transisi ini tak berjalan dengan mudah karena ada banyak jebakan untuk sampai

pada situasi demokratis, dan salah satunya adalah kondisi di mana para elite politik menjalankan politik nasionalisme sempit atau nasionalisme kesukuan (ethno-nationalism). Snyder sangat menekankan bagaimana peran dari media sebagai pembuat opini publik yang bisa menyokong kepentingan para nasionalis sempit tadi. Mereka bisa mengobarkan kepentingannya yang sangat terbuka, terutama karena pada masa awal demokratisasi terjadi, suasana berpendapat bebas terjadi, pers lebih mudah didirikan, dan semuanya bisa menjadi alat bagi para maniak kekuasaan untuk menaikkan posisinya. Namun jika media massa cukup profesional, mereka bisa jadi pengimbang atas kepentingan-kepentingan para elite politik, dan media tak perlu jatuh menjadi corong kepentingan elite politik tadi.

4. Di sini lalu muncul pertanyaan kepada para pengelola pers di berbagai wilayah: seberapa kontribusi yang telah (juga sedang dan akan) diberikan oleh para pembuat opini publik tersebut untuk menyokong proses demokratisasi di berbagai daerah, terutama dengan momen pemilihan langsung kepala daerah ini. Apakah pers ini menunjukkan peran yang signifikan untuk mendorong proses demokratisasi; di mana masyarakat sebagai konstituen politik utama diberi informasi yang wajar dan berimbang atas berbagai kandidat politik tersebut-lepas dari berbagai perbedaannya dengan kontestan lain? Ataukah pers akan jatuh pada suatu pemihakan kepada salah satu calon dengan berbagai alasan di belakangnya?

5. Menjadi suatu praktik umum di mana media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat, tidak profesional, dan menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada dinamika yang terjadi dalam politik lokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapan selamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Jika mengutip pernyataan dari Serikat Penerbit Pers maka perusahaan pers yang sehat hanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yang membuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh dari kebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut.

Kondisi seperti ini rupanya juga akan terulang dalam sepuluh tahun kemudian, ketika pemilihan kepala daerah berlangsung secara serentak. Mari sekarang kita melihat bagaimana kondisi yang seharusnya dimiliki oleh sebuah media.

## **2. KEMBALI PADA FONDASI DASAR: ALASAN KITA BER-MEDIA**

John C. Merrill dan S. Jack Odell, menyebutkan, “Filsafat, menurut pendapat kami, harusnya menjadi fondasi dasar dari jurnalisme modern – yaitu suatu usaha yang merujuk pada para praktisinya, sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kebenaran (truth) dan memberikan realitas yang bisa dipercaya dan menarik, atau setidaknya merupakan sebagian dari realitas yang bisa mempengaruhi banyak kehidupan dan kebutuhan kita” <sup>2</sup>

Merril dan Odell mengajukan sejumlah topik filosofis yang kerap diajukan dalam kaitan dengan praktek komunikasi menyangkut masalah: Rasionalitas, Makna (*Meaning*), Kebenaran (*Truth*) dan Etik <sup>3</sup>.

Sementara itu untuk mengawali bukunya, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Haryatmoko menulis demikian:

“Media memiliki idealisme, yaitu memberikan informasi yang benar. Dengan idealisme semacam itu, media ingin berperan sebagai sarana pendidikan. Pemirsa, pembaca, dan pendengar akan semakin memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Hanya, realitas sering mempunyai arah yang berlawanan. Derap-derap realitas sangat diwarnai oleh struktur pemaknaan ekonomi yang dirasakan menghambat idealisme itu. Dinamisme komersial seakan menjadi kekuatan dominant penentu makna pesan dan keindahan. Logika pasar mengarahkan pengorganisasian sistem informasi.” <sup>4</sup>

Betulkah ekonomi menjadi hal yang paling penting dan mendasari seluruh motif dari kegiatan kita ber-media ini? Tidakkah ada alternatif dari rejim berpikir seperti ini? Betulkah tidak ada cara berpikir lain di luar kerangka ekonomi ini?

Penulis percaya bahwa masih ada alternatif di luar itu, dengan kembali pada dasar bahwa media hadir untuk merekatkan hubungan antara manusia satu dengan lainnya, dan media adalah alat untuk makin mempertinggi harkat martabat manusia. Selain itu praktik media massa yang dilakukan tetap penting untuk mempertimbang aspek etika di dalamnya. Bermedia dengan beretika adalah satu tarikan nafas yang akan membuat media jadi lebih punya wibawa di mata public dan juga akan membuat ia bertahan lebih lama.

Haryatmoko dalam bagian lain bukunya juga menyebut fenomena determinisme teknologi yang menuju pada adanya kultus teknologi.

“Yang terakhir ini (kultus teknologi –IH) semakin memacu rasionalitas instrumental dimana sarana lebih menjadi lebih prioritas daripada tujuan. Presentasi atau penyutradaraan makna informasi menjadi lebih penting daripada pesan informasi itu sendiri. Kultus teknologi akhirnya mengalahkan tujuan dan idealisme media. Dalam situasi seperti itu yang akan dirugikan adalah masyarakat, meskipun bukan tidak mungkin bahwa ada persetujuan diam-diam dari mereka.”<sup>5</sup>

### 3. ETIKA MEDIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Cees J. Hamelink, professor bidang Komunikasi Internasional dari Universitas Amsterdam bertanya dalam sebuah tulisan: “Bisakah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fondasi dari Etika Media?”<sup>6</sup> Prof. Hamelink menyebutkan bahwa HAM adalah instrumen internasional yang telah mendapat kesepakatan sebagian besar warga dunia, dan telah menjadi panduan moral bagi perilaku bangsa-bangsa di dunia selama ini. Pada ketentuan HAM ini pula tersebut ada sejumlah prinsip dasar yang mencakup hal tentang penolakan terhadap praktek diskriminasi, penolakan terhadap pengrusakan terhadap integritas manusia secara sengaja, dan hak untuk mendapatkan kebebasan.

Sejumlah hak yang terkandung dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1948 itu mencakup:

- o the right to life (hak hidup)
- o the right not to be tortured (hak untuk tidak disiksa)

- o the right not to be arbitrarily arrested (hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang)
- o the right to food (hak untuk mendapatkan makanan)
- o the right to health care (hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan)
- o the right not to be discriminated against (hak untuk tidak mengalami diskriminasi)
- o the right to due process of law (hak untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum)
- o the right to education (hak untuk mendapatkan pendidikan)
- o the right to political participation (hak untuk berpartisipasi secara politik)
- o the right to fair working conditions (hak untuk kondisi kerja yang fair)
- o the right to freedom of association (hak untuk membentuk asosiasi – kelompok)
- o the right to freedom of expression (hak untuk menyampaikan pendapat / berekspresi)

Dengan demikian kita melihat bahwa sejumlah hak yang telah diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bisa menjadi panduan untuk mempertimbangkan masalah etika dalam media massa.

Pencarian ini telah menunjukkan pada kita bahwa praktek komunikasi yang ada selama ini dari para pekerja bidang komunikasi, ataupun para industriawan yang terlibat di dalamnya harus mempertimbangkan sejumlah

nilai dasar, dimana praktek kerja komunikasi harus tetap mempertimbangkan hal tentang etika, hal tentang makna dasar dari hubungan antar manusia. Alasan utama yang kerap diajukan pada masalah ekonomi bukanlah hal yang jadi satu-satunya alasan untuk industri ini bekerja. Alasan etis, alasan dasar keberadaan media komunikasi, dan alasan kemanusiaan harus selalu pertimbangan.

#### **4. MEDIA DALAM KONTEKS PILKADA SERENTAK**

Ada tuntutan yang demikian kuat agar media yang ada melakukan fungsi pendidikan politik kepada warga, bersikap imparisial kepada para calon, dan bersikap netral dalam peliputan terhadap para calon ini. Pertanyaannya, apakah semua itu mungkin dilakukan oleh media yang sudah sedemikian terkonsentrasi, terbalut kepentingan pemiliknya, dan menjadi institusi bisnis yang kerap merampas ruang publik dan akal sehat publik?

Untuk tidak terjebak pada pemikiran yang nihilisme atau jatuh pada pesimisme akut, maka kita bisa melihat sejumlah titik terang dari masih adanya media-media yang cukup independen, cukup bisa dipercaya, dan tidak masuk dalam kepentingan para oligarki yang menguasai berbagai daerah.

Calon

Belum lama ini Jaring mengadakan suatu pelatihan jurnalisme investigasi kepada 16 orang jurnalis di Indonesia (mewakili tak kurang dari 12 propinsi) terkait dengan pilkada ini. Pilkada ini dilakukan di 270 tempat (provinsi, kabupaten dan kota) dan tak kurang dari 167 calon adalah petahana (incumbent – pejabat yang sedang memerintah). Dari kondisi ini maka hal yang perlu diwaspadai dari petahana adalah : <sup>7</sup>



- politisasi birokrasi
- penggelembungan dana anggaran (khususnya dana bantuan sosial, dana desa, dana keistimewaan di Yogyakarta) untuk kepentingan pilkada (baca: kemenangan kembali)
- naiknya kekayaan petahana dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang dicatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- banyaknya keluar perijinan yang terkait dengan pembukaan lahan perkebunan (kelapa sawit contohnya), pertambangan (emas, batubara, nikel dll)
- kita pun menemukan adanya banyak mata anggaran yang dipersiapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan walaupun hal ini tak langsung berarti sebagai korupsi.

Kita tentu berharap bahwa media akan kembali pada salah satu fungsi dalam demokrasi yaitu melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan, serta untuk konteks di Indonesia mendorong arah demokratisasi yang lebih sejati, dan memunculkan adanya semakin banyak pemimpin daerah yang berkualitas, bersih, dan mengemban kepercayaan publik.

Tentu media massa bukanlah satu-satu pihak yang biasa melakukan hal tersebut, karena seluruh pelaku dalam pilkada ini (KPU, Bawaslu, Panwaslu, kelompok pemantau dari masyarakat sipil, netizen) punya peluang yang sama untuk mengarah pada tujuan di atas. Media di sini berfungsi komplementer namun juga strategis sebagai suatu mekanisme “*early warning system*” bagi masyarakat. Betapa mengesankan jika kita mendengar berita tentang suatu provinsi yang dalam empat periode kepemimpinan yang berbeda, seluruhnya adalah tersangka kasus korupsi di provinsi tersebut.

Pendeknya media harusnya menjadi solusi dari problem pilkada ini, dan bukan merupakan bagian dari masalah. Baru-baru ini Dewan Pers pun telah membuat surat edaran soal keberpihakan yang harusnya dihindari oleh media dalam pilkada. Kita berharap media pun dikontrol atau diawasi oleh masyarakat agar media tetap kita bisa harapkan sebagai solusi dari problem pilkada ini – untuk mengawasi jalannya pilkada dengan jujur, tidak berpihak dan memberikan informasi selengkap mungkin kepada publik. Media yang sebaliknya menjadi problem dalam pilkada akan kehilangan kepercayaan dari publik, dan pada akhirnya akan menuju kemunduran bahkan kematian. Media adalah bisnis kepercayaan yang tak mudah dibangun, namun sangat mudah untuk merusaknya. (\*)

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> “Pers Lokal dan Pilkada”, Harian *Kompas* 9 Februari 2005, dan “Pers Lokal dan Demokratisasi”, Harian *Kompas* 30 Juni 2005.

<sup>2</sup> John C. Merrill dan S. Jack Odell, *Philosophy and Journalism*, New York: Longman, 1983, hal.ix.

<sup>3</sup> Misalnya hal ini dibahas oleh S. Jack Odell, yang menulis buku bersama John C. Merrill, *Philosophy and Journalism*, New York & London: Longman, 1983.

<sup>4</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal.9

<sup>5</sup> Haryatmoko 2007, hal. 11

<sup>6</sup> “Can Humanrights be a foundation for media ethics?” dalam Bart Pattyn (ed), *Media Ethics: Opening Social Dialogue*, Leuven: Peeters, 2000

<sup>7</sup> Dari hasil diskusi dalam pelatihan JARING “Pelatihan Jurnalisme Investigasi Berbasis Data dalam Pilkada 2015” di Jakarta 3-5 November 2015.

## KEPUSTAKAAN

- Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Merrill, John C. dan S. Jack Odell, 1983. *Philosophy and Journalism*, New York: Longman.
- Pattyn, Bart (ed), 2000. *Media Ethics: Opening Social Dialogue*, Leuven: Peeters.